



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 119 TAHUN 2020

TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan di maksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
18. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Tahunan Pemerintah Kota Banjarmasin yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banjarmasin, dengan jadwal kegiatan pengawasan dan obyek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Jadwal dan obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banjarmasin serta berdasarkan kewenangan yang ada.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 2020 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



<b>Irban III</b>	Reviu DAK Dinas Lingkungan Hidup	Reviu Laporan Keuangan SKPD	Reviu Laporan Keuangan Pemko Banjarmasin	Reguler Dinas Kesehatan	Reviu KUA PPAS 2021	Reviu Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2021	Audit Kinerja Dinas Sosial	ATT Dinas Lingkungan Hidup	Reviu RKA 2021	Reguler Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Reguler Sekretariat DPRD	Reviu DAK 2020
	Reviu DAK Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	ATT Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Evaluasi LAKIP SKPD	Reguler Badan Keuangan Daerah	Reguler Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Penutupan Kas Semester I Tahun 2020	Reguler Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Audit Kinerja Dinas Lingkungan Hidup		ATT Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Reguler Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Penutupan Kas Semester II Tahun 2020
			Probitas Audit Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					Reviu DAK			Reviu DAK	
<b>Irban Khusus</b>	Pemeriksaan Khusus											
	Reviu PBJ	Audit Kepatuhan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Evaluasi LAKIP SKPD	Reguler Bagian Pemerintahan	Reguler Bagian Organisasi	Reguler Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Reviu PBJ	Reguler Bagian Kesejahteraan Rakyat	Reguler Bagian Hukum	Reguler Bagian Umum	Reguler Bagian Administrasi Pembangunan	Penutupan Kas Semester II Tahun 2020
	Bimtek		Reviu LAKIP Pemko Banjarmasin	Reviu PBJ	Reguler Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Reviu Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2021			Reviu RKA 2021	Reviu PBJ		
						Penutupan Kas Semester I Tahun 2020						

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA